

Hara Ngākau Kino | Peninjauan kejahatan kebencian

KERANGKA ACUAN

IKHTISAR PROYEK

Te Aka Matua o te Ture | Law Commission akan meninjau hukum di Aotearoa Selandia Baru terkait kejahatan kebencian, dengan fokus apakah hukum terkait harus diubah untuk membuat jenis delik-delik baru yang bermotif kebencian. Untuk tujuan dari peninjauan ini, “kejahatan kebencian” berarti tindakan yang telah dikategorikan sebagai pelanggaran kriminal berdasarkan hukum Selandia Baru dan, sebagai tambahan, dilakukan karena alasan benci atau permusuhan terhadap sekelompok orang yang memiliki karakteristik serupa (seperti ras, warna kulit, kebangsaan, agama, gender atau jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, umur, atau disabilitas).

Saat ini, hukum di Aotearoa Selandia Baru menanggapi kejahatan kebencian dengan menjatuhkan hukuman. Apabila seseorang melakukan tindak kriminal karena alasan permusuhan terhadap sekelompok orang yang memiliki "karakteristik yang sama", pengadilan harus mempertimbangkan hal ini sebagai faktor yang memberatkan pada saat menjatuhkan hukuman (lihat pasal 9(1)(h) tentang Undang-Undang Penjatuhan Hukuman tahun 2002).

Laporan dari Royal Commission of Inquiry atas serangan teroris di Christchurch masjidain pada tanggal 15 Maret 2019 merekomendasikan pembentukan delik-delik baru yang bermotif kebencian. Secara khusus, rekomendasi 39 mengusulkan agar delik-delik baru yang bermotivasi kebencian dibuat dalam:

- (a) Ringkasan Undang-Undang Pelanggaran 1981 (berkaitan dengan delik-delik yang ada yaitu perilaku atau bahasa yang menyinggung, penyerangan, perusakan yang disengaja, dan intimidasi); dan
- (b) Undang-Undang Tindak Kriminal tahun 1961 (sehubungan dengan delik-delik yang sudah ada mengenai penyerangan, pembakaran, dan perusakan dengan sengaja).

CAKUPAN PENINJAUAN

Peninjauan dari Law Commission akan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pertimbangan seputar:

- (a) Apakah hukum yang berlaku saat ini di Aotearoa Selandia Baru menanggapi kejahatan kebencian secara memadai (dalam pasal khusus

9(1)(h) Undang-Undang Penjatuhan Hukuman tahun 2002, yang mengharuskan motif permusuhan untuk dipertimbangkan ketika menjatuhkan hukuman kepada pelaku).

- (b) Apakah kekhawatiran mengenai operasi hukum saat ini harus ditangani melalui upaya legislatif (atau operasional), contohnya, pembuatan jenis delik-delik bermotif kebencian.
- (c) Apabila jenis delik-delik bermotif kebencian perlu dibuat:
 - (i) jenis pelanggaran yang sudah ada apa saja yang perlu disesuaikan;
 - (ii) apa saja karakteristik umum yang perlu dicakup;
 - (iii) bagaimana unsur kebencian atau permusuhan dari jenis delik-delik tersebut harus ditetapkan;
 - (iv) hukuman maksimum apa yang layak diberikan; dan
 - (v) apakah amendemen terhadap Undang-Undang Penjatuhan Hukuman diperlukan untuk mempertimbangkan jenis delik-delik baru dan untuk memastikan para pelaku kejahatan kebencian dijatuhi hukuman yang sesuai.

Dalam proses melakukan rekomendasi reformasi, Law Commission akan memperhitungkan te ao Māori dan memberikan pertimbangan terhadap karakteristik multikultur di masyarakat Selandia Baru.

Peninjauan ini tidak akan mempertimbangkan untuk mengkriminalisasi perilaku yang tidak termasuk sebagai jenis pelanggaran dalam hukum Selandia Baru. Untuk menghindari keraguan, peninjauan ini tidak akan mempertimbangkan rekomendasi 40 dan 41 dari Laporan dari Royal Commission of Inquiry mengenai serangan teroris di Christchurch masjidain pada tanggal 15 Maret 2019, yang menyangkut:

- (a) hukum terkait ujaran kebencian, termasuk pasal 61 dan 131 Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1993; dan
- (b) definisi mengenai kapan sebuah publikasi dianggap "tidak pantas" di pasal 3 Undang-Undang Klasifikasi Film, Video, dan Publikasi 1993.

WAKTU DAN PROSES

Law Commission bermaksud untuk melakukan konsultasi publik pada awal tahun 2025.

Law Commission bermaksud untuk melaporkan kepada Menteri yang bertanggung jawab atas Law Commission dengan rekomendasinya pada pertengahan tahun 2026.

TENTANG LAW COMMISSION

Law Commission adalah agensi Kerajaan Inggris (Crown agency) yang menyediakan saran reformasi hukum untuk Pemerintah. Pemerintah tidak mengatur cara kami melaksanakan pekerjaan kami atau rekomendasi yang kami buat.

Kami melakukan penelitian dan pelibatan, kemudian membuat rekomendasi kepada Pemerintah untuk menyempurnakan kualitas hukum. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diterbitkan dalam bentuk laporan kepada Kementerian Hukum. Kementerian harus menyampaikan laporan kami kepada Parlemen.

Pemerintah memutuskan apakah dan bagaimana mereka akan melakukan perubahan terhadap hukum tersebut. Anda dapat mengetahui selengkapnya tentang tugas yang kami lakukan di situs web Law Commission.